

BENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI DI INDONESIA



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SUYADI
08370060**

PEMBIMBING

**Dr. Subaidi, S.Ag.,M.Si
NIP: 19750517 200501 004**

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Latar belakang dari pembahasan tentang bentuk dan karakter politik dinasti dalam penelitian skripsi ini yakni karena adanya fenomena politik dinasti aras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Selain itu, pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Perbedaan lokalitas budaya dalam setiap daerah merupakan hal yang mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung di suatu wilayah tertentu.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian *liberary research* yang menggunakan teori perilaku politik (*polical behaviouralism*), dan teori perilaku politik tidak terlepas dari orientasi politik (*political oriented*) dan budaya politik (*political culture*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik dinasti di Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik masyarakat Indonesia yang dalam perjalanannya menjadi budaya politik. Politik dinasti di Indonesia merupakan politik dinasti negara dunia ketiga, yang berarti bahwa dinasti politik yang berkembang lebih identik dengan keturunan, dari pada kualitas aktor politik dan kaderisasi partai politik.

Secara konseptual, politik dinasti di Indonesia yang lebih banyak berorientasi pada kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan melalui budaya familisme memiliki dua karakter. *Pertama*, karakter halus (*by accident*) dan *kedua*, karakter vulgar (*by desaign*), dengan memiliki bentuk yang berbeda-beda pula diantara berbagai wilayah yang ada di Indonesia. (1) *populism dynasties* yang ada di Bantul, Kendal, Probolinggo dan Indramayu. (2) *Octopussy dynasties* yang ada di Banten. (3) *Tribalism dynasties* yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. Terakhir, (4) *feodalism dynasties* yang ada di Bali dan Yogyakarta. Budaya politik familisme merupakan gejala yang sangat kuat yang mempengaruhi lahirnya politik dinasti di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Perilaku Politik, Orientasi Politik, Budaya Politik Familisme.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Suyadi

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suyadi

NIM : 08370060

Judul : **Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Mei 2014 M.

Pembimbing I

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si

NIP: 19750517 200501 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02 /K.JS-SKR/PP.00.9/2079/2014

Skripsi/ tugas akhir dengan judul : BENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI
DI INDONESIA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suyadi
NIM : 08370060
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Nilai munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP: 19750517 200501 004

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 18 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyadi
Nim : 08370047
Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "*Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Mei 2014
Penyusun



MOTTO

“Dengan Bekerja Keras dan Berdo’a Kepada Allah, Segala Hal dapat Dilakukan ”

dengan

“ Berpikir, Berkarya dan Bermanfaat bagi Sesama Adalah Tujuan Hidup yang Sebenarnya ”

Sebab

“Sebaik-baik Manusia Adalah Ia yang Bermanfaat bagi yang Lainnya”

sehingga

“Manusia yang Sukses Adalah Manusia yang dapat Mensukseskan Yang lainnya”

“Don’t Think To Be the Best But Think To Do The Best”

PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu tercinta (Reji-Sawiyah), yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa, semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang tak terhingga dari-Nya.
- Kakak-kakakku tercinta Sunardi, Rusmiyati, Sumarni, sekaligus adikku Mustajab, tak lupa keponakan-keponakanku; Nisa, Nizam, dan Sofiana Zulhatin Maulidiyah
- Kepada seseorang yang mampu menyinari hatiku agar selalu dalam bingkai keshalihan hati, semangat dan mengoyak kemalasanku ade' Anis Lailatin Hasanah
- Kepada guru mudaku Bapak Ir. Hamdi Buldan, Kang Muhammadun AS, Kang Munawwir Aziz, Kang Gugun, kang Hasan dan semua guru mudaku di PPM. Hasyim Asy'arie, Yogyakarta yang tidak dapat aku sebut satu persatu
- Kepada kawan-kawanku senasib seperjuangan Zaenal, Gus Khoiri, Gus Danuji, Al Kahfi (cong), Taufani Wahyu (pangdam), Mujib, jua yang tak bisa ku tulis satu persatu
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk para bapak dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.
- Tak lupa juga untuk semua kawan-kawan BLD.
- Kawan-kawan semua yang ada di Lembaga Penelitian Teknologi Informasi Pelataran Mataram (LPTIPM) Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡād	Ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل, وهداه بعد ضلال, وفقّه بعد غفلة, والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا, وهدايا ومعلما, ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, وبعد.

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaannya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salamsemoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya.yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islamsehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Babak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Wakil DekanI Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, selaku Wakil Dekan III Faultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag, M. Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah SiyasaH Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan. Semogasegala kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah. Dengan bertambahnya kemulyaan dunia hingga ke akhitar kelak.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua dan saudara yang penulis selalu cintai dan sayangi.
10. Kepada teman-teman akademisi yang membantu penyusun untuk mencari data-data skripsi dengan baik.

Dengan segenap kerendahan hati beriring ketundukan penulis haturkan sebesar-besar terimakasih atas segala yang telah diberikan. Demikian pula segenap pihak lainya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu-persatu.

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan keculi ucan terima kasih atas sumbangan tenaga,dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya sekripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatans yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang

akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang.*Aaamiin.*

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Penyusun

SUYADI

NIM. 08370060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS/PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok masalah	11
C. Tujuan dan kegunaan	11
D. Telaah pustaka.....	11
E. Kerangka teoritik.....	13
F. Metode penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan	19
BAB II. TEORI DAN KERANGKA KONSEP PERILAKU POLITIK DALAM POLITIK DINASTI DI INDONESIA	21
A. Pengertian Perilaku Politik (Political Behaviour).....	21
B. Kerangka Konsep Perilaku Politik.....	27
C. Definisi dan Perkembangan Politik Dinasti di Indonesia	32
1. Pengertian Politik Dinasti	32
2. Perkembangan Politik Dinasti di Indonesia	34
BAB III. BENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI DI INDONESIA	39
A. Bentuk-Bentuk Politik Dinasti	39
1. Politik Dinasti Makro.....	39

2. Politik Dinasti Mikro.....	44
B. Karakter Politik Dinasti	56
1. Politik Dinasti Halus.....	56
2. Politik Dinasti Vulgar.....	66
C. Pro dan Kontra Para Elit Terhadap Politik Dinasti di Indonesia	72
BAB IV. ANALISIS BENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM POLITIK ISLAM.....	83
A. Sejarah Politik Dinasti dalam Politik Islam	83
B. Analisis.....	86
BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran–Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
CURICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya Politik Indonesia memiliki karakteristik yang menarik. Budaya politik *kawulo* adalah salah satu wujud keunikan tersebut. Budaya politik *kawulo* menempatkan posisi perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai strategi pengkekalan kekuasaan. Dinasti politik menampilkan kekuatan *status quo* melalui familinya.¹

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuatan politik itu bukan hanya sekadar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur diberbagai daerah. Konsepsinya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik, kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia.

Bukti terkini adalah pelantikan Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2016 Airin Rachmi Diany. Pasangan Airin-Benyamin dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, yang tidak lain adalah kakak ipar Airin. Kali ini Airin adalah orang keempat dari keluarga besar Atut yang menjadi pejabat di empat dari delapan kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Sebelumnya, adik Atut, Tubagus

¹ Nurul Qolbi Izazy “*Sisi Lain Politik Dinasti*” . (Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta:2011) .,hlm.1-2

Khaerul Zaman, menjadi Wakil Wali Kota Serang, dan adik Atut lainnya, Ratu Tatu Chasanah, menjadi Wakil Bupati Serang. Adapun ibu tirinya, Heryani, adalah Wakil Bupati Pandeglang.²

Selain itu, ada sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah, mempunyai hubungan keluarga atau kerabat pejabat lain. Mereka tersebar di 15 daerah provinsi, seperti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.³

Berkaca dari fakta diatas, bila dilihat dari analisis politik modern, kemunculan politik dinasti di akibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi. Sebab, hal ini yang kemudian secara struktural mengakibatkan otonomi overdosis, sehingga muncul kemudian kekuasaan etnis di daerah. Dari etnisitas inilah dinasti tumbuh, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik dan pendidikan politik tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, dalam analisis budaya politik, yang menyebabkan otonomi overdosis sehingga memunculkan kekuasaan etnis di daerah yaitu adanya lempengan-lempengan primordial⁴ yang diikuti oleh genderang politik yang ditabuh

²<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/25/058475690/Dinasti-Politik-Banten-Bentuk-Pembajakan-Demokrasi>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2013.

³Lihat hasil penelusuran *Kompas* dalam *Kompas* cetak pada tanggal 18 Oktober 2013.

⁴Menurut Herbert Feith bahwa lempengan primordial yang menjadi pijakan NKRI terdapat tiga kelompok, (1). Plural: di tandai oleh demokrasi yang begitu kuat antara warga asli dan keturunan, misal Cina, Arab dan Eurasia. (2). Mosaik: dicirikan oleh diversifikasi kelompok-kelompok etnis yang ratusan

oleh para politisi.⁵ Otonomi daerah hanya dijadikan sebagai eksklusif daerah terhadap pusat. Gagalnya meramu etnisitas yang ada di republik ini dan otonomi daerah yang seharusnya menjadi media aktualisasi potensi-potensi lokal, justru melahirkan raja-raja baru yang tidak kalah eksploitatifnya dengan sistem yang sentralistik.

Hal itulah yang kemudian membuktikan bahwa dinasti politik di Indonesia ini bukan tanpa gejala. Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat public. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *statusquo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.⁶

Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam pemahaman dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra tersebut kemudian menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada terkini. Dalam satu sisi ada pembatasan didalam politik dinasti dengan cara membatasi sanak saudara atau

jumlahnya dengan identitas tradisionalitasnya.(3). Masyarakat multigrup: yaitu ditandai oleh adanya kelompok-kelompok bersatu dalam lingkup yang lebih besar dengan keanggotaan lebih besar pula.

⁵Lihat Bakhril Ihsan A, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*: (Bandung, PT Remaja Rosdakarya:2009),.hlm 45.

⁶Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi; Dinasti Politik di Aras Lokal* (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18, No.2, Juli 2013),.hlm.,204.

famili untuk maju dalam pilkada. Pada sisi lain, ada yang tidak melarang dinasti politik, hanya saja kaderisasi partai politik perlu dibenahi.

Fatkhuri, seorang pemerhati politik, alumni Australia National University Canberra mengungkapkan bahwa sebuah politik dinasti mengandaikan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan.⁷ Biasanya ini adalah cara agar sanak famili bisa dengan mudah meraih jabatan publik. Politik dinasti juga ditandai dengan adanya sanak saudara yang menduduki posisi strategis dalam lembaga politik. Tujuannya adalah agar sanak saudaranya dengan mudah mendapatkan jabatan tinggi dalam organisasi politik. Sehingga politik dinasti lebih cenderung menampilkan kekuasaan yang koruptif.

Teori negarawan Inggris abad ke-19 Lord Acton "*power tends to corrupt absolut power corrupt absolutely*", secara implisit berpesan bahwa sumber korupsi adalah kekuasaan, lebih tepatnya kekuasaan yang absolut. Dinasti Soeharto memang tidak dominan di panggung politik, tetapi menguasai akses ekonomi, sehingga rakyat tidak mendapatkan hak-hak ekonomi secara adil. Dinasti Soeharto telah melahirkan oligarki.⁸

Menurut Guru Besar Ilmu Politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, Jeffrey A Winters, oligarki yang diciptakan Soeharto pada tahap pertama memunculkan kelompok jenderal TNI, tahap kedua melahirkan pengusaha

⁷<http://www.scribd.com/doc/49776753/Sisi-Lain-Politik-Dinasti> diakses pada tanggal 15 Nopember 2013

⁸Lebih lengkapnya, lihat Artikel Gugun el-Guyanie yang berjudul "*Politik Dinasti dan Konstitusionalisme*" 2013.

keturunan Tionghoa. Pada tahap ketiga baru oligarki pribumi dan keempat oligarki keluarga Soeharto.⁹

Banyak sekali pandangan pro dan kontra terhadap politik dinasti, namun, menurut para pakar ilmu politik bahwa tidak semua politik dinasti didasari atas upaya untuk meleggangkan kekuasaan keluarga. Dalam beberapa hal politik dinasti dijalankan dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, tanpa menggunakan label keluarga.

Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan dinasti politik ini sangat erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat, budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Maka, pertanyaan yang sangat relevan adalah dalam dinasti politik ini adalah bagaimana bentuk dan karakteristik preferensi budaya politik dalam pembentukan politik dinasti?.

Apalagi preferensi budaya politik erat kaitannya dengan perilaku memilih yakni kecenderungan memilih untuk memilih berdasarkan sumber informasi yang ditangkap baik rasional maupun tradisional. Oleh karena itu, aksentuasi budaya politik sangat sesuai dalam pembahasan dinasti politik. Aksentuasi budaya politik dalam membahas dinasti sebenarnya sudah dilakukan dalam berbagai sudut pandang neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik.

⁹Lihat koran Kompas cetak edisi tanggal 20 April 2011.

Pendekatan *neo-patrimonialisme* sendiri digunakan oleh Haris (2007) dan Zuhro (2010). Menurut perspektif ini, dinasti politik merupakan akses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun diluar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan famili.¹⁰

Hal itulah yang kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam perspektif ini. Dinasti dalam perspektif ini. Dinasti politik sebagai elit tunggal diartikan hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan. Dinasti politik dalam tipologi elit ini bentuknya prismatic, yaitu dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah (*governing elit*) yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya tokoh informal yang memiliki pengaruh sosio-politik maupun sosio-kultural dalam masyarakat (*non governing elit*), dan juga masyarakat (*non-elite*).

Adapun patronase terwujud dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintah dan masyarakat oleh orang-orang terdekat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam demonstrasi masyarakat karena sadar bahwa jumlah elit tunggal ini sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengaktifkan kekuasaan.

¹⁰Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi; Dinasti Politik di Aras Lokal* (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18, No.2, Juli 2013),.hlm.,205.

Sedangkan makna elit pluralis lebih dinamis dibandingkan dengan elit tunggal yang sangat statis. Elit pluralis diartikan sebagai jejaring antar elit dalam konteks berbagi kekuasaan dalam ekonomi dan politik (Haryanto 2007). Hal ini sekaligus juga sebagai koreksi atas elit tunggal yang jumlahnya kecil sehingga rawan terjadinya pergolakan kemasyarakatan. Monopoli dengan mengunci pos jabatan politik formal dalam pandangan elit pluralis tidaklah tepat dalam menghadapi dinamika masyarakat. Akan lebih baik jika logika elit sendiri dijalankan dalam kerangka oligopoli. Artinya, kontrol atas sumber kekuasaan tetap dijalankan namun juga mengundang aktor lain untuk masuk dalam jejaring elit tersebut.

Elit pada dasarnya bersifat jamak dan berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan dan perannya bisa naik turun tergantung situasinya. Artinya, status elit ini bukanlah suatu keajaiban yang didapatkan dalam hubungan askriptif, namun bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting (Soelaiman 1998).

Pemahaman kedua, dinasti politik sebagai bentuk politik keluarga (*politik clan*) digunakan Kreuzer (2005) dan Cesar (2013).¹¹ Dinasti politik muncul sebagai eksekutif dari warisan feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksud bukan hanya penguasaan sumber daya ekonomi saja, tetapi juga terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat

¹¹*Ibid.*, hlm., 205.

dengan melibatkan para tokoh informal. Tokoh informal tersebut pada umumnya memiliki massa besar yang digunakan untuk menopang kekuasaan keluarga.

Mutualisme tersebut dibangun atas mekanisme pertukaran kepentingan, yakni tokoh informal mendapatkan aksesibilitas terhadap pembuatan kebijakan publik, sedangkan keluarga bisa mengikat loyalitas pemilih melalui pengaruh tokoh informal, seperti yang terdapat dalam kasus Filipina Selatan, dinasti politik muncul karena sistem institusionalisasi politik maupun penegakan hukum yang lemah karena kooptasi kekuatan klan politik. Bahkan, dinasti politik disana sudah berkembang layaknya monarki politik dengan memiliki milisi bersenjata sendiri yang digunakan untuk mengintimidasi warga.

Kekuatan negara di aras lokal melemah karena kontrol klan politik yang tersebar baik di jajaran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Maka dalam taraf ini, dinasti politik sudah berkembang seperti “negara dalam negara” (*state qua state*) dalam sistem politik yang lemah.

Yang ketiga, yakni kajian dinasti politik sebagai bentuk praktik politik predator. Pemahaman politik predator sendiri merupakan pengembangan tesis Migdal (1988) mengenai *local strongmen* maupun Sidel (2005) tentang *local bossism*.¹² Studi pendekatan ini dilakukan oleh Asako (2010) dan McCoy (1994) yang menganalisis tumbuhnya dinasti politik justru terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik di tingkat lokal. Dalam hal ini, jejaring keluarga telah menguasai

¹²*Ibid.*, hlm.,206.

berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya.

Dinasti politik berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan menempatkan sanak familinya ke dalam jajaran perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena itu, praktik penjarahan ekonomi berlangsung secara terus-menerus karena praktiknya selalu dilakukan oleh jejaring elit keluarga. Perspektif dinasti politik sebagai bentuk kartel *local strongmen* dan *local bossism* yang meneliti tentang adanya pengaruh seorang elit yang secara individual membangun hubungan patrimonialistik dalam masyarakat maupun negara.¹³ Dalam hal ini, dinasti politik merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud kolektif yang didasarkan pada hubungan famili, etnisitas, maupun hubungan darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal.

Terhadap ketiga bentuk perspektif varian dari budaya politik tersebut, pada dasarnya penulis setuju dengan desain penjelasan makro tersebut bahwa budaya politik patrimonialisme merupakan akar terbentuknya dinasti politik. Namun demikian, analisis yang ditampilkan umumnya didominasi tiga pendekatan itu saja sehingga dinasti politik hanya dimaknai sebagai kelanjutan dari pengaruh elit membajak demokrasi. Sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam kajian dinasti politik adalah ketidaksesuaian dalam memahami preferensi budaya politik yang mempengaruhi terbentuknya dinasti.

¹³*Ibid.*, hlm., 207.

Budaya politik patrimonialisme sendiri sebenarnya adalah faktor eksternal saja atau bisa dikategorisasikan sebagai perspektif Indonesianis dalam menganalisis dinasti politik yang kemudian berkembang menjadi *common ground* dalam memahami dinasti. Kita sendiri juga perlu menganalisis faktor internal dalam suatu rezim tersebut seperti konstelasi yang berkembang dalam hubungan kekerabatan penguasa sehingga memutuskan berpolitik dinasti. *Thesis statement* dalam tulisan ini adalah hubungan keluarga atau familisme menjadi penting dibicarakan terkait dengan bagaimana keluarga inti mempengaruhi penguasa untuk menjalankan kekuasaan dinasti.

Hal inilah yang selama ini luput dari perbincangan mengenai dinasti, yaitu konstelasi internal memiliki andil besar sebagai faktor kunci mengamankan kekuasaan. Familisme sendiri merupakan hipotesis atas pengaruh keluarga dalam membentuk nilai, moral, maupun orientasi kekuasaan sehingga terjadi model monarki kekuasaan. Untuk itu, fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah pengaruh familisme yang berkembang menjadi budaya politik sebagai basis suksesi kekuasaan. Sehingga dapat dimengerti bentuk dan karakteristik dinasti politik di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut tentang bentuk dan karakter politik dinasti yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia.”**

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia?
2. Bagaimanapandangan politik Islam terhadap politik dinasti di Indonesia?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan tentang bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini kontribusi rill guna memperkaya wacana politik di negara Indonesia
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik, lebih khusus lagi bagi mereka yang akan mengkaji tentang politik dinasti.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bentuk dan karakter politik dinasti. Beberapa literatur yang membahas permasalahan dalam politik dinasti antaranya adalah :

Tatang M. Amirin dalam bukunya yang membahas mengenai *pokok-pokok teori sistem*, bahasan dalam buku ini lebih banyak berupa teori-teori bentuk sistem dan jenis atau model suatu sistem, termasuk dengan sistem politik yang di gagas oleh beberapa ahli politik.¹⁴

Bambang Cipto dalam karyanya yang berjudul *Presiden Profesional atau Politik Dinasti*.¹⁵ Dalam buku ini menjelaskan tentang elit politik yang mengutamakan politik kekerabatan sebagai strategi politik untuk mendapatkan kekuasaan dari pada profesionalitas, atau kualitas, kemampuan yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin atau dalam buku ini disebut presiden.

Slamet Soemiarno dkk, dalam karyanya *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*.¹⁶ Buku ajar ini menjelaskan tentang bangsa dan budaya Indonesia, sehingga di dalamnya juga menjelaskan politik dinasti secara defenitif.

Skripsi Muntiasih, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Kebijakan Politik Dinasti Al-Muwahhidun di Andalusia Tahun 1146-1228 M*.” Skripsi ini membahas tentang sejarah kebijakan, di dalam dinasti Al-Muwahhidun.

¹⁴ Amirin M. Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta:Rajawali Pers,1992)...hlm.,2

¹⁵Cipto, Bambang. *Bebek Dunggu, Presiden Profesional atau Politik Dinasti*,(Jakarta:BIGRAF Pub.1999)...hlm.,3

¹⁶Soemiarno, Kartono dkk. *BukuAjar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010)...hlm.,12.

Dalam hal ini, sebagai penguat wacana politik dinasti masa lampau sehingga tumbuh hingga sekarang dalam bentuk modern.¹⁷

Skripsi Sri Wahyuni, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Konflik Politik Dinasti Abbasiyah- Dinasti Fatimiyah (Analisis Historis Terhadap Lahir Mahdar Baghdad)*. Skripsi ini menjelaskan tentang sejarah politik dinasti pada masa Abbasiyah hingga Fatimiyah. Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang akibat konflik politik negara (dalam hal ini adalah dinasti Abbasiyah hingga Dinasti Fatimiyyah).¹⁸

Sejauh ini belum ada penelitian yang fokus membahas tentang bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Penelitian yang sudah ada hanya sebatas membahas fenomena politik dinasti. Tetapi untuk fokus dalam bentuk dan karakter politik itu sendiri belum ada.

E. Kerangka Teoritik

Dalam membongkar penelitian ini, penyusun mula-mula menggunakan teori perilaku politik, dimana perilaku politik ini dimaksudkan sebagai penjelasan awal bagaimana politik dinasti dapat berjalan di lingkup individu (*aktor politik*), masyarakat (*kelompok politik*) dan tipologi politik (*kepribadian pemimpin*) sehingga dapat menjelaskan bagaimana dinasti politik tersebut menjadi budaya politik masyarakat yang semakin menjamur di Indonesia kini.

¹⁷ Muntiasih, "*Kebijakan Politik Dinasti Al-Muwahhidun di Andalusia Tahun 1146-1228 M.* (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2012).,hlm.,1

¹⁸Sri Wahyuni, *Konflik Politik Dinasti Abbasiyah- Dinasti Fatimiyah;Analisis Historis Terhadap Lahir Mahdar Baghdad.*(Fakultas Adab UI N Sunan Kalijaga Yogyakarta:2013).,hlm.,1

Selanjutnya, dalam lingkup karakter dan bentuk. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti: *pertama*. Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. *Kedua*, karakter juga bisa bermakna "huruf". Contoh karakter tulisan Arab.¹⁹ Dalam hal ini adalah karakter yang bersifat karakteristik, yaitu ataupun dalam bahasa Inggris (*characteristic*). Dalam menunjukkan ekstitensi dirinya manusia (dalam hal ini sistem politik dinasti) pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. Begitu juga dalam sistem politik dinasti yang memiliki karakter ataupun ciri-ciri yang dimiliki.

Menurut Slamet Soemiarso, dalam karyanya yang berjudul *Buku Ajar III Bangsa, Budaya dan Lingkungan Hidup di Indonesia* yang didalam buku ini juga menjelaskan sedikit tentang bentuk dan karakter politik dinasti yaitu dengan mengidentikkannya menjadi dua karakter, yakni terlihat jelas (*fulgar*) dan tidak jelas (*halus*). Dengan teori ini, penelitian ini terlihat jelas bagaimana bentuk dan karakter politik dinasti.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan memepertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat. Politik dinasti adalah sistem atau alat yang digunakan oleh individu yang mungkin bisa dipergunakan dengan baik atau sebaliknya dipergunakan sebagai keutuhan kekuasaan politik kekerabatan semata.

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Karakter>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

W.B. Saunders, (1977: 126) menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Gulo W, (1982: 29) menjabarkan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Begitu juga dalam politik dinasti, apakah ia dapat berjalan dengan baik di atas titik tolak etis dan moral, tentu dalam hal ini adalah etika politik.

Kamisa, (1997: 281) mengungkapkan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian. Wyne mengungkapkan bahwa kata karakter berasal dari bahasa Yunani “*karasso*” yang berarti “*tomark*” yaitu menandai atau mengukir, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang atau dalam hal ini (politik dinasti) yang berperilaku jujur, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan kepribadian (*personality*) seseorang (elit politik yang menjalankan politik dinasti).

Tahap selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori behavioural, teori ini menerangkan bahwasannya perilaku politik (*political behaviour*) yang dilakukan oleh elit politik dengan menggunakan strategi politik dinasti yang sudah tersistem dengan rapi. Dalam bahasan bentuk dan karakter, objek kajian perilaku politik dalam

politik dinasti tersebut adalah tepat. Sebab, perilaku politik inilah yang menciptakan bentuk dan karakter itu sendiri (politik dinasti).²⁰

Dalam teori behavioural, perilaku politik dapat di lihat dari sudut pandang sosiologis, psikologis dan rasionalitas.²¹ Dalam hal ini, politik dinasti (berikut bentuk dan karakternya) dilihat dari psikologi dan sosiologis. Secara psikologi politik, politik dinasti sebagai alat (strategi bahkan sistem) yang digunakan oleh elit politik dalam melakukan aktivitas politiknya sebagai upaya mengekalkan kekuasaan dengan melibatkan kerabat atau keluarga.

Dalam segi sosiologisnya, fakta menyatakan bahwa politik dinasti sudah menjadi budaya politik yang tidak terelakkan (*budaya politik familisme*). Otonomi daerah yang tidak dibarengi dengan perilaku politik yang baik, mengakibatkan kekuasaan politik menjadi ajang kontestisasi para elit, sehingga demokrasi pun kehilangan nilai-nilainya. Apalagi di tambah dengan kaderisasi partai politik yang tidak efektif dan tidak menentu.

Demikian kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian

²⁰S.P.Varma, *Teori Politik Modern* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada: 2007),.hlm.,56. Kaum brhaviouralism berpendapat bahwa Penelitian harus dihubungkan dengan berbagai macam permasalahan sosial yang mendesak. Peneliti politik harus relevan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Tidak terkecuali budaya masyarakat yang terimbas dari politik dinasti.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politik, diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

mengenai Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan untuk menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu salah satu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta menganalisa permasalahan yang ada dan menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Fakta yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sedangkan Data primernya yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang akan dibahas.

Dan untuk pemahaman yang lebih luas dan lebih terperinci, maka buku-buku serta informasi dari media dan juga jurnal-jurnal yang terkait dengan hal ini, menjadi rujukan tambahan data sekunder sebagai katagori fenomena faktual, sebab

²²Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 63.

yang diteliti adalah berita yang sering didiskusikan di kenchah perpolitikan Indonesia dewasa ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³Jadi penyusun hanya mengambil sebagian fenomena di wilayah tertentu seperti politik dinasti Atut Choisyah di Banten.Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴*Puposive sampling* atau sampling bertujuan ini bisa dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.²⁵

1. Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian Ini penyusun menggunakan satu Pendekatan masalah yaitu: *Pendekatan Deskriptif Analitis*

a. Pertama *PendekatanDeskriptif Analitis*.

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti dan melihat dan menggambarkan apakah sesuatu yang diteliti melalui sampel atau data yang ada tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

²⁴ M. Hariwijaya., *Teknik Penulisan.*, hlm. 49.

²⁵ Suharsimi., *Prosedur Penelitian.*, hlm. 113.

2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data yang ada dan kemudian menganalisa data-data yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Kesimpulan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab kedua, memuat tentang teori dan kerangka konsep dalam politik dinasti di Indonesia. Pada bab ini, memuat bagian-bagian dari teori perilaku politik yaitu definisi, kerangka konsep perilaku politik serta perkembangan politik dinasti di Indonesia.

Bab ketiga memuat tentang bentuk-bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Pada bab ini, menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dan karakter politik

dinasti di Indonesia yang meliputi, bentuk-bentuk dan karakternya serta sikap pro dan kontra para elit tentang politik dinasti di Indonesia.

Bab keempat memuat tentang analisis bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Pada bab ini, menjelaskan bahwa politik dinasti memiliki tujuan dan sasaran yaitu sebagai kekuasaan politik, dan juga bisa sebagai keutuhan kekuatan politik dan bagian terakhir yaitu menjelaskan bagaimana pandangan politik Islam terhadap budaya dinasti politik di Indonesia.

Bab kelima adalah bab penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian atau penjelasan-penjelasan yang sudah tersampaikan dari bab awal hingga akhir bab V yaitu penutup ini, penyusun mengelompokkan dalam beberapa kesimpulan dari panjang lebar permasalahan bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik dinasti di Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik (*political behavioralism*) para aktor politik dalam melanggengkan, mengamankan kekuasaan politik dengan menempatkan kerabat, keluarga atau familinya di dalam posisi strategis baik di bidang formal pejabat publik (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis).
2. Politik dinasti di Indonesia merupakan politik dinasti negara dunia ketiga, yang berarti bahwa dinasti politik yang berkembang lebih kuat beridentik dengan keturunan, dari pada kualitas aktor politik dan kaderisasi partai politik di negara maju. Misalnya, dinasti Soekarno dan Soeharto dan seterusnya di Indonesia berbeda dengan Kennedy, Clinton, dan Bush di Amerika Serikat, Hatoyama di Jepang dan Lee di Singapura yang pada umumnya terjun ke dunia politik harus melewati fase pengkaderan politik yang cukup lama, baik dalam internal (keluarga) maupun eksternal (kaderisasi di dalam partai politik).

3. Secara konseptual, politik dinasti di Indonesia memiliki karakter halus dan vulgar, dan secara praktiknya memiliki bentuk yang berbeda-beda diantara berbagai wilayah yang ada di Indonesia. (1), *populism dynasties* yang ada di Bantul, Kendal, Probolinggo dan Indramayu. (2)*Octopussy dynasties* yang ada di Banten. (3)*Tribalism dynasties* yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. Terakhir, (4) *feodalism dynasties* yang ada di Bali dan Yogyakarta.
4. Budaya politik familisme merupakan gejala yang sangat kuat yang mempengaruhi lahirnya politik dinasti di Indonesia. Dari bentuk familisme (hubungan darah langsung) dan quasi-familisme (afeksi, solidaritas, dan kepercayaan) hingga egois-familisme (dorongan publik dan faktor emosional).
5. Sistem Budaya Indonesia merupakan wujud norma dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat, dalam konteks budaya politik dinasti adalah pantas atau tidak dalam sistem budaya Indonesia itu sendiri diukur oleh kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan keamanan bagi masyarakat yang kesemua itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam tujuannya.
6. Budaya politik dinasti dalam pandangan politik Islam menjadi sah-sah saja dilakukan, asalkan politik dinasti dilakukan dengan (1) tidak menyimpang dari aturan-aturan siyasah syar'iyah. (2) Lebih mengutamakan kepentingan rakyat (3) menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penyusun sampaikan adalah penelitian yang dilakukan penyusun bukan tidak mungkin terdapat kekurangan dari sisi yang lain selain fokus dalam bentuk dan karakter politik dinasti, tentu saran yang tepat adalah apabila ada penelitian yang lain sejalan dengan penelitian ini, maka sebaiknya lebih melengkapi data-data yang mungkin kurang atau belum diteliti sekalipun, agar lebih menyempurnakan penelitian tentang bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Amirin M. Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta:Rajawali Pers,1992)
- Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta, LP3S:1982).
- Abul A'la Al-maududi, *Khilafah dan Kerajaan;Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Bandung: Kharisma, 2007).
- Bakhir Ihsan A, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*: (Bandung,PT Remaja Rosdakarya:2009)
- Cipto, Bambang. *Bebek Dunggu, Presiden Profesional atau Politik Dinasti*,(Jakarta:BIGRAF Pub.1999).
- Djazuli, Prof, H.A., *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Efriza, *Ilmu Politik;Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung, Alfabeta cv:2013)
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik; Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2006)
- Jamez M. Kouzes dan Barry Z. Posner, *Leadership the Challenge, Tantangan Kepemimpinan Edisi ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006.)
- M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik;Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2009).
- Muluk Hamdi, *Pengantar Psikologi Politik* (Jakarta, Rajawali Pers:2012)
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta, Graha Ilmu:2013)

Soemiarno, Kartono dkk. *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010)

S.P.Varma, *Teori Politik Modern* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada: 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sitepu, P Anthonius, *Teori-teori Politik* (Yogyakarta, Graha Ilmu:2012).

Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Siti Zuhro, dkk. *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal* (Yogyakarta: Ombak, 2009)

Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Yogyakarta, UGM Press: 2010)

Referensi Skripsi

Muntiasih, “*Kebijakan Politik Dinasti Al-Muwahhidun di Andalusia Tahun 1146-1228 M.* (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013)

Wahyuni, Sri. *Konflik Politik Dinasti Abbasiyah- Dinasti Fatimiyah; Analisis Historis Terhadap Lahir Mahdar Baghdad.* (Fakultas Adab UI N Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2012).

Referensi Jurnal dan Lainnya

Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi; Dinasti Politik di Aras Lokal* (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18, No.2, Juli 2013)

Nurul Qolbi Izazy “*Sisi Lain Politik Dinasti*”. (Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta: 2011).

Artikel Gugun el-Guyanie yang berjudul “*Politik Dinasti dan Konstitusionalisme*” 2013.

Syahrul Mustofa, *Politik Dinasti dalam Perspektif RUU Pemilukada* (Publik Politik Dinasti” diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Hasil Penelusuran Koran Kompas cetak edisi tanggal 20 April 2011.

Hasil penelusuran *Kompas* dalam kompas cetak pada tanggal 18 Oktober 2013.

Referensi Internet

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/25/058475690/Dinasti-Politik-Banten-Bentuk-Pembajakan-Demokrasi>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2013.

<http://www.scribd.com/doc/49776753/Sisi-Lain-Politik-Dinasti> diakses pada tanggal 15 Nopember 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Karakter>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politik, diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2013/10/131014_forum_dinasti_politik.shtml. Di akses pada tanggal 12 April 2014.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/25/058475690/Dinasti-Politik-Banten-Bentuk-Pembajakan-Demokrasi>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2013.

<http://depewblew2dutz.blogspot.com/2010/10/pengaruh-budaya-politik-di-dalam-sistem.html>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/172842-dinasti-politik-di-pilkada--salah-siapa>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://www.merdeka.com/politik/5-jabatan-kepala-daerah-yang-diwariskan-ke-anak-dan-istri/bupati-kutai-kartanegara.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://www.merdeka.com/politik/5-jabatan-kepala-daerah-yang-diwariskan-ke-anak-dan-istri/bupati-kutai-kartanegara.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2014.

<http://sinarharapan.co/index.php/news/read/9632/ironi-politik-klientalisme.html>. Di akses pada tanggal 24 April 2014.

<http://asepawaludinfajari.wordpress.com/2012/07/09/faham-tribalisme/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2014

<http://www.tempo.co/topik/masalah/2130/Keistimewaan-Provinsi-Yogyakarta>. Diakses pada tanggal 18 April 2014.

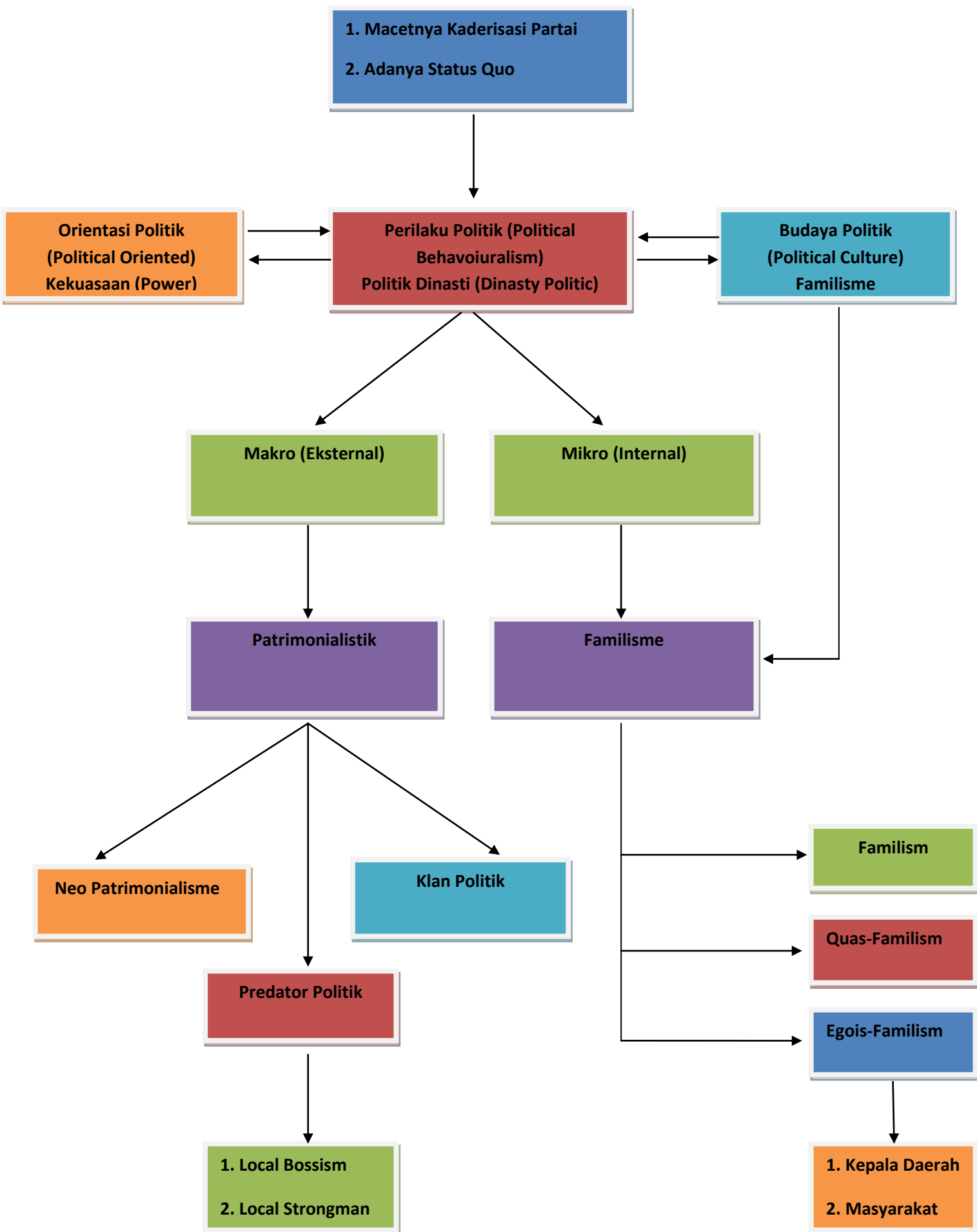
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/317172-mahfud-md--politik-dinasti-harus-berkualitas>. Di akses pada tanggal 8 April 2014.

<http://www.sumbawanews.com/berita/politik-dinasti-dalam-presfektif-ruu-pemilukada>, diakses pada tanggal 28 April 2014

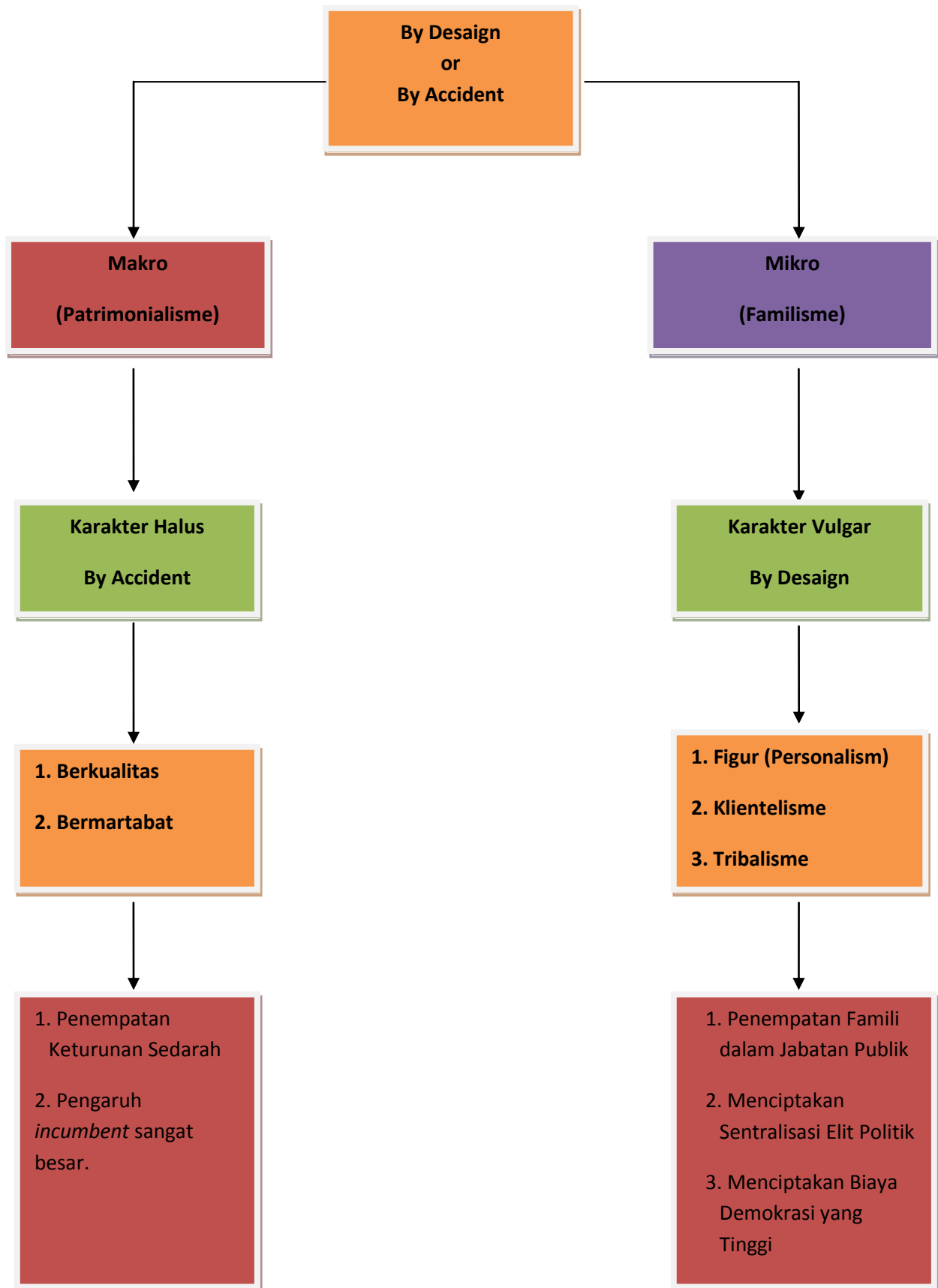
<http://dakwahwaljihad.wordpress.com/2010/04/30/sejarah-bani-umayyah/>.Diakses pada tanggal 15 Mei 2014.

CURRICULUME VITAE	
Nama Lengkap	Suyadi
Tempat & Tanggal Lahir	Pati, 12 Februari 1989
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	Reji
Nama Ibu	Sawiyah
Alamat Asal	Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen Rt/Rw: 06/03 Trangkil, Pati
RIWAYAT PENDIDIKAN	
MI Luthful Ulum Wonokerto	1996 – 2002
Mts Misbahul Ulum Pasucen	2002– 2004
MA Manabi’ul Falah Ngemplak Kidul	2004 – 2007
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008 – 2014
RIWAYAT ORGANISASI	
OSIS MA Manabi’ul Falah	2004
PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia)	2009
KMPP (Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Pati Yogyakarta)	2010-2012
Komunitas Peresensi Jogjakarta	2011-sekarang
LPTI Pelataran Mataram	Sekarang

Gejala dan Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Dinasti di Indonesia



Karakter Politik Dinasti di Indonesia



TERJEMAHAN

NO	Al-Qur'an	NO	Hadits
1.	Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepada-Ku". (QS: Al-Muknimun: 52.)	1.	Artinya: "Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin diantara mereka." (HR. Abu Daud, r.a).
2.	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS: Ali Imran Ayat:	2.	Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., bersabda Nabi SAW, setiap kamu itu adalah pamimpin dan setiap pamimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pamimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya".

	159)		
3.	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS: An-Nisa':58)	3.	Artinya: “Dari Auf bin Malik, telah bersabda Rasulullah SAW, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.”(HR. Imam Muslim).
4.	Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa	4.	Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang dibaliknya digunakan berperang dan berlindung. Apabila pemimpin memerintah berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka baginya ada pahala, apabila memerintah dengan dasar selain itu, maka dosanya akan dibalas.”(HR. Imam Muslim).

	[4]: 59)		
5.	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.	5.	Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, ada tujuh golongan yang dinaungi Allah SWT, dibawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang adil...”.
6.	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS: al-Baqarah: 190)		
7.	Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah		

	<p>kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: al-Anfal: 61)</p>		
8.	<p>“dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya: sedang Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS: al-Anfal: 60)</p>		
9.	<p>Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah</p>		

	<p>menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS: An-Nahl: 91)</p>		
10.	<p>Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS: Al-Hasr: 7)</p>		

BIOGRAFI TOKOH

Afan Gaffar: dikenal sebagai ilmuwan yang aktif menulis di berbagai media massa dan kerap memberikan pelatihan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun DPRD. Ia pernah menjadi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ia juga seorang pengamat politik yang dekat dengan Amien Rais serta banyak aktivis dan tokoh di Indonesia. Jabatan terakhir sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik Lokal dan Otonomi Daerah serta Sekretaris MWA (Majelis Wali Amanah) UGM.

Sosok kelahiran 21 Juni 1947 itu meninggalkan dua orang anak, Nina Ulfah Nulututadjie dan Erlangga D.A. Gaffar, dari pernikahannya dengan Sudjiatmi Purwaningsih. Afan juga adalah seorang kakek dari dua orang cucu, Bawika Kinennara dan Bima Nayotama Gaffar. Selama hayatnya, Afan dinilai sangat berdedikasi tinggi pada dunia pendidikan dan politik di Tanah Air.

Kiprah pedagogi ala Afan dimulai dari Sekolah Rakyat Tente II, Bima, Nusatenggara Barat. Selepas pendidikan dasar itu, dia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Tente Bima. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Bima, ia memilih menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM pada 1966. Setelah lulus, Afan kemudian mengambil gelar master di Political Science Northern Illinois, Amerika Serikat (1979). Sedangkan, gelar PhD diraihinya di Political Science the Ohio State University pada 1988.

Dalam kariernya, lelaki yang wafat pada usia 55 tahun itu banyak menduduki jabatan penting. Pada 1998, Afan menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Golongan sekaligus menjadi anggota Tim Tujuh Departemen Dalam Negeri Bidang Perancang UU Politik. Dia sempat terlibat dalam Tim Verifikasi Partai Politik pada Pemilihan Umum 1999 kemudian menjadi anggota Komisi Pemilu (KPU) hingga 2000.

Kariernya terus melejit. Pada 1999, Afan dipercaya menjadi staf ahli Mendagri Bidang Pembangunan. Dia pun ditarik Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid sebagai deputy. Tak hanya itu, Afan sempat menjabat anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Jabatan terakhir sebelum almarhum wafat adalah Ketua Program Studi Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Dedikasi Afan buat dunia pendidikan pun tidak sedikit. Selain menjadi dosen tetap, ia pernah terpilih sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat UGM. Dia juga pernah menjabat pembantu rektor Universitas Islam Indonesia.

Wasisto Raharjo Jati: dilahirkan di Yogyakarta, 15 Maret 1990. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikannya di kota tersebut. Pada tahun 2012, menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang dipublikasikan seperti *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *Jurnal Borneo Administrator*, *Jurnal Ulul Albab*, *Jurnal el-Harakah*, dan jurnal ilmiah lainnya. Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional, serta menulis dalam salah satu bab buku berjudul *Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM* (2011) terbitan Center of Politic and Governance Studies, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Center of Politic and Media

Research Yogyakarta. Bidang kajian yang kini tengah digeluti adalah globalisasi, politik lokal, ekonomi-politik internasional serta politik budaya.

Siti Zuhro: Lahir di Blitar, 7 November 1959, Pendidikan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Master Ilmu Politik di The Flinders University, Adelaide, Australia. Doktoral Ilmu Politik di Curtin University, Perth, Australia Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI. Menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia. Menulis buku Konflik dan Kerjasama AntarDaerah (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2004); Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005); Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006); Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Menuju Daya Saing Ekonomi Daerah, Studi di Empat Provinsi (Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, 2007); Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan menuju Kemandirian, Jakarta: PT THC Mandiri, 2008); Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009); Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah & Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010); Model Demokrasi Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali (Jakarta: PT THC Mandiri, 2011).